

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dian Etika

12040254213 (Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) diannetikaa@gmail.com

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (Prodi S1 PPKn. FISH. UNESA) rr_nanik_setyowati@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Good governance* adalah suatu mekanisme, proses, atau tata cara yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan publik, dalam hal ini permasalahan yang diangkat ialah pengelolaan lingkungan. Fokus penelitian ini ialah penerapan prinsip-prinsip *good governance* yakni : prinsip strategi visi, efektifitas, partisipasi, dan penerapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prinsip strategi visi, untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan mempunyai beberapa strategi yaitu membuat beberapa program pengelolaan lingkungan dengan menggandeng beberapa Kader Lingkungan yaitu wakil dari masyarakat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. 2) Prinsip efektifitas, melibatkan pihak lain seperti keterlibatan media dan keterlibatan LSM untuk membantu mempromosikan dan memberikan sosialisasi guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan. 3) Prinsip Partisipasi, masyarakat telah dilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan pengelolaan lingkungan. 4) Prinsip penerapan hukum, keterlibatan Kader lingkungan dalam masyarakat sangat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam menegakkan hukum tentang pengelolaan lingkungan di masyarakat, masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan akan diberikan teguran, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Dari beberapa prinsip tersebut, prinsip yang paling dominan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ialah prinsip partisipasi, karena dalam prinsip tersebut masyarakat telah dijadikan sebagai partner/rekan kerja yang baik oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam mengelola lingkungan Kota Surabaya.

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip *Good Governance*, partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkungan.

Abstract

Surabaya city having governance good environment it is not separated from the role of the Sanitation And Gardens Institution of Surabaya Local Government. The purpose of this research is to find the implementation of good governance principles on Sanitation and Gardens Institution of Surabaya Local Government to improve community participation in managing environment. The Good governance is the mechanism, practice and procedure for the government with the citizens to deal with public policy, including environmental management. Focus this research is the implementation of principles good governance: the strategy vision, effectiveness, participation, and application of the law. The results of the study showed that: 1) the principle strategy vision, to reach vision Sanitation And Gardens Institution of Surabaya Local Government to improve community participation for the management environment has had several strategies which make some management programs the environment to engaged several cadres environment that is representatives of the to move public participation. 2) the principle the effectiveness of, with other parties as the involvement of the media and ngo engagement to help promoting and provide socialization to raise awareness of the the importance of environmental management. 3) the principle participation, the community have been involved in the planning stages, the implementation of the, and evaluation in any activity environmental management. 4) the principle the rule of law, the involvement of cadres environment in the community is highly help Sanitation And Gardens Institution of Surabaya Local Government in enforcing the law of environmental management in the community, the citizens do a violation of neighborhood is reprimand, administration sanction, and criminal sanctions .The of some of the principles, the principle of the most dominant in increase citizens participation in environmental management is the principle of participation, because in principle of this communities has been made a partner / colleagues either by Sanitation And Gardens Institution of Surabaya Local Government in manage the environment throughout surabaya .

Keywords: principles of good governance, community participation, environmental management.

PENDAHULUAN

Kota Surabaya dikenal sebagai Kota Adipura atau kota yang bersih, hal ini karena Pemerintah Kota Surabaya berhasil memperoleh penghargaan adipura kencana yang diterima pada 23 November 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Bidakara Jakarta. Penghargaan adipura kencana tersebut merupakan penghargaan di bidang kebersihan lingkungan untuk kota yang memiliki tata kelola lingkungan yang baik.

Kunci keberhasilan Kota Surabaya dalam memperoleh penghargaan adipura kencana tersebut karena pemerintah Kota Surabaya memiliki beberapa inovasi dalam mengelola lingkungan Kota Surabaya, antara lain adalah pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai sumber energi, pemanfaatan lahan sempit menjadi taman rekreasi, lalu dengan menjaga kelestarian sumber mata air, hingga pada penanaman pohon yang dilakukan secara rutin. Hasil keseluruhan tersebut berkat kerja keras pemerintah Kota Surabaya yang konsisten dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Surabaya. Beberapa inovasi pengelolaan kebersihan lingkungan tersebut karena pemerintah Kota Surabaya memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Surabaya yakni Surabaya *Green and Clean*.

Tata kelola lingkungan yang baik di Kota Surabaya tidak lepas dari peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Dinas ini merupakan salah satu mitra pemerintahan Kota Surabaya yang membantu tugas-tugas pemerintah Kota Surabaya dalam menangani tata kelola lingkungan di Kota Surabaya. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya mempunyai visi dan misi ialah menciptakan Kota Surabaya yang hijau, asri, bersih, dan bercahaya. Oleh karena itu beberapa inovasi dalam mengelola lingkungan di Kota Surabaya telah dikerjakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya salah satu diantaranya ialah membangun dan merawat taman kota.

Keberadaan taman kota sebagai upaya menghijaukan Kota Surabaya dan berfungsi untuk mengurangi derajat suhu panas yang diterima Kota Surabaya. Oleh karena itu, di taman kota dilakukan penanaman beberapa tumbuhan-tumbuhan yang rindang, hijau, dan asri. Semua itu bertujuan agar masyarakat dapat menikmati kesejukan di Kota Surabaya. Taman kota tersebar di berbagai wilayah di Kota Surabaya. Taman yang di kelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya terdiri atas 2 jenis taman yaitu Taman Aktif dan Taman Pasif.

Data Taman Aktif dan Pasif di Kota Surabaya

No.	Uraian	Jumlah Taman (Lokasi)	Luas (m ²)
1.	Taman Aktif	54	303.561,13
2.	Taman Pasif	270	748.694,97

Sumber Data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Tahun 2014

Keterangan :

Taman aktif ialah taman yang di dalamnya dibangun suatu kegiatan pemakai taman, sehingga pemakai taman secara aktif menggunakan fasilitas di dalamnya sehingga para pengunjung atau pengguna taman bisa beraktivitas

secara leluasa di area taman. Contoh taman aktif ialah Taman Bungkul, Taman Ekspresi, Taman Flora, dan lain-lain. Sedangkan taman pasif ialah taman yang hanya dapat dinikmati keindahan visualnya, sebagai aksentuasi untuk menarik perhatian, dan karena kerindahannya, tetapi tanpa mengadakan aktivitas di dalamnya, seperti taman yang berada di pertigaan, di perempatan, taman di median jalan. Contoh Taman di Median Jl. Raya Darmo, Taman di Median Jl. Raya Diponegoro, Taman di Median Jl. Merr, dan lain-lain.

Taman kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu ciri khas dari Kota Surabaya, atau sesuatu yang dapat dijadikan ikon Kota Surabaya yang mampu dikenal dunia akan kebersihan dan keindahannya. Prosentase jumlah taman kota di Kota Surabaya dapat dikatakan hampir 30% dari luas Kota Surabaya. Hal ini karena pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman kota merupakan pembangunan yang bersifat berkelanjutan, artinya pembangunan yang tidak akan terhenti begitu saja tanpa adanya penyelesaian. Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam pembangunan taman kota sangat membantu pemerintah Kota Surabaya, karena untuk urusan pertamanan merupakan tugas pokok yang wajib dikerjakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Selain pertamanan, tugas pokok lain dan sekaligus menjadi persoalan pelik yang memerlukan peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ialah pengelolaan kebersihan. Pengelolaan kebersihan di Kota Surabaya merupakan tantangan besar bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, karena untuk menciptakan kebersihan di kota yang memiliki luas wilayah ± 33.451,14 ha (dalam Perda No.12 Tahun 2014) bukan sebuah persoalan yang mudah, terutama dengan keberadaan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan, yakni kota yang menjadi pusat aktivitas kegiatan perekonomian penduduk dari berbagai kota di Provinsi Jawa Timur, sudah dapat dipastikan jumlah penduduk di Kota Surabaya akan terus naik dan karena itu juga pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya juga perlu mendapat perhatian yang lebih. Sebab kenaikan jumlah penduduk akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan jika masyarakat tidak memerdulikan kondisi lingkungannya dengan baik.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam kinerjanya membangun Kota Surabaya telah bekerja semaksimal mungkin, sehingga lingkungan di Kota Surabaya dapat tertata dengan baik. Akan tetapi keadaan lingkungan yang telah tertata baik tersebut akan sia-sia apabila tidak ada peran serta masyarakat untuk sadar berpartisipasi dalam memelihara lingkungan Kota Surabaya. Beberapa informasi di surat kabar *online* menunjukkan bahwa masyarakat Kota Surabaya cenderung mengabaikan kepeduliannya terhadap pemeliharaan lingkungan, sebagai contoh masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat seperti berita yang di lansir di www.surabayanews.co.id pada 11 November 2015 sebagai berikut.

“Jelang musim hujan, Sungai Surabaya di kawasan pintu air Grege Surabaya dilakukan

ekstra pembersihan. Kondisi sungai yang penuh sampah inilah yang cukup memprihatinkan karena berbagai macam jenis sampah menumpuk, seperti sampah rumah tangga, sofa, kasur, kayu dan jenis sampah lainnya. Hal ini lantaran minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai.”

Dari kutipan surat kabar *online* tersebut, di simpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan di Kota Surabaya masih rendah. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan menimbulkan kondisi sungai penuh dengan sampah. Oleh karena itu, perlu dilakukan ekstra pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di sekitar daerah Greges Surabaya. Jadi dengan demikian, dalam hal pengelolaan lingkungan apabila hanya peran dari pemerintah Kota Surabaya saja yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan peran serta masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan sangat mempengaruhi kesuksesan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menciptakan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya, sebab masyarakat termasuk sekumpulan individu yang secara langsung melakukan interaksi dengan lingkungan dalam setiap kegiatan mereka. Apabila partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan tidak terapkan dengan baik maka pencemaran lingkungan akan tetap terus terjadi dan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam mengelola lingkungan yang sudah baik akan berujung sia-sia. Jadi dalam hal ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu membentuk sistem kerja sama yang baik dengan masyarakat, agar masyarakat tergerak partisipasinya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai organisasi pemerintahan membentuk sistem kinerja organisasi yang baik. Organisasi merupakan sebuah wadah atau tempat bagi individu-individu yang bertugas melaksanakan suatu visi dan misi tertentu. Hal ini sesuai dengan konsep organisasi yang dikemukakan oleh Rivai (2009:169), organisasi adalah sebuah wadah yang memungkinkan individu-individu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ialah menciptakan tata kelola lingkungan yang baik bersama masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh pelaku yang memiliki peran dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu ditingkatkan. Salah satu cara dengan menerapkan *good governance*.

Menurut Sumarto (2004:17) *Good Governance* adalah mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *Good Governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka *good governance* diartikan sebagai suatu tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Masalah yang akan diselesaikan dalam hal ini ialah permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Kota Surabaya. Untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah dalam hal ini yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, memiliki peran hanya sebagai salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Jadi implikasinya adalah pemerintah tidak serta merta berperan menjadi penguasa masyarakat dengan aturan-aturan yang di tentukannya sendiri, akan tetapi pemerintah sebagai pihak yang mampu mendorong terciptanya kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Di dalam prinsip-prinsip *good governance* ditekankan adanya suatu konsep kerjasama yang baik yang dapat dilakukan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dengan masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai hak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan kata lain, Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik termasuk dalam hal ini tata kelola lingkungan.

Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan bukan persoalan yang mudah. Oleh karena itu dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya berpatok pada penerapan prinsip partisipasi, tetapi juga perlu di dukung dengan menerapkan prinsip penerapan hukum, prinsip efektivitas, dan prinsip strategi visi. Berbagai prinsip tersebut diterapkan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan target yang diharapkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diharapkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya dapat menjadi organisasi yang memiliki integritas dan kompetensi yang dapat dipercayai mampu membuat keadaan lingkungan Kota Surabaya menjadi lebih baik.

Penerapan *good governance* mutlak dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, karena dengan memahami *good governance* akan tercipta interaksi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, dalam menerapkan *good governance*, perlu adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip *good governance*, karena prinsip-prinsip tersebut yang akan menuntun terwujudnya *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* yang diungkapkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) terdapat Sembilan prinsip, yakni partisipasi, penerapan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, dan strategi visi (Mardiasmo, 2004:24).

(1) Partisipasi (*participation*), setiap warga mempunyai suara formulasi keputusan, baik secara

langsung maupun intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif. (2) Penerapan hukum (*fairness*), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. (3) Transparansi (*transparency*), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dan dapat diterima oleh para mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. (4) Responsivitas (*Responsiveness*), lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*. (5) Orientasi (*Consensus Orientation*), *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. (6) Keadilan (*Equity*), Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan. (7) Efektivitas (*Effectiveness*), Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. (8) Akuntabilitas (*Accountability*), Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. (9) Strategi visi (*Strategic vision*), Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari berbagai prinsip tersebut, penelitian ini berfokus pada prinsip strategi visi, efektifitas, partisipasi dan penerapan hukum. Alasan pemilihan prinsip-prinsip tersebut karena: (1) Prinsip strategi visi bertujuan untuk mengetahui beberapa strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama strategi dalam hal mencapai visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya salah satunya ialah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan taman. (2) Prinsip efektifitas dipilih karena prinsip efektifitas mampu mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan prinsip efektifitas juga akan mendeskripsikan keberhasilan atau kegagalan dari adanya kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

(3) Prinsip partisipasi dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat, oleh karena itu dengan mengambil prinsip partisipasi akan secara lebih rinci dijelaskan mengenai bentuk-bentuk partisipasi apa saja yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. (4)

Dipilihnya prinsip penerapan hukum karena prinsip penerapan hukum ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat yang berupa aturan-aturan hukum untuk mengatur setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk membuat jera masyarakat dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan pengertian partisipasi masyarakat Sedangkan menurut seorang ahli pekerjaan sosial, Sulaiman (1985:6) (dalam Huraerah 2011:110) mengungkapkan bahwa "Partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial didalam dan atau diluar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggungjawab sosialnya"

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai subyek yang mempunyai wewenang untuk menciptakan gagasan baru atau inovasi baru dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Inovasi atau gagasan baru tersebut digunakan untuk mendorong keikutsertaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diatur untuk mengelola lingkungan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pelestarian lingkungan salah satu faktor penyebabnya karena pihak aparat pemerintah yang kurang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Pada dasarnya untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan perlu adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mardikanto dan Soebianto, yaitu "Karena partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunann yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya." (Mardikanto dan Soebianto, 2012:82).

Oleh karena itu, sebagai aparatur pemerintah perlu memiliki prinsip pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Lembaga/organisasi pemerintahan melakukan kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat terdapat partisipai yang berupa respon positif maupun respon negatif. Beberapa respon tersebut juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut nantinya akan bisa mempengaruhi tingkat banyak atau sedikitnya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Slamet (1985) (dalam Mardikanto dan Soebianto 2012:91) juga menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yakni (1) Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. (2) Adanya kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi. (3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Sedangkan menurut Tjokroaminoto (dalam Girsang 2001:12), faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah : (1) Faktor kepemimpinan, dalam menggerakkan partisipasi perlu adanya pemimpin yang berkualitas. (2) Faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Nasution, bahwa selain karakteristik individu, karakteristik sosial juga turut mempengaruhi adanya partisipasi. Karakteristik sosial tersebut adalah perilaku komunikasi. Nasution (2009:74) menjelaskan bahwa "Perilaku komunikasi merupakan kegiatan interaksi responden dalam bentuk bertukar pendapat dan komunikasi antar pribadi dengan orang lain (diukur dengan skor: tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu".

Melalui faktor faktor tersebut, partisipasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik ketika pihak aparat pemerintah membuka kesempatan yang lebar untuk masyarakat dalam hal tata kebijakan publik. Untuk itu keikutsertaan masyarakat dalam mengelola pembangunan negara sangat penting untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap semua pihak. Adanya partisipasi masyarakat juga sebagai wujud implementasi bentuk nyata dari bentuk negara yang menganut asas demokrasi.

Mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Menurut Thubany (dalam Purnamasari 2006:23) partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri sehari-hari dan representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional di dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat harus didasarkan pada (1) pembuatan keputusan, (2) penerapan keputusan, (3) menikmati hasil, dan (4) evaluasi hasil. Sementara empat aspek yang menjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yakni : (1) informasi atau akses lainnya, (2) inisiatif (*voice/suara*) dan apresiasi warga (masukan), (3) mekanisme pengambilan keputusan. (4) kontrol pengawasan.

Berdasarkan beberapa macam bentuk partisipasi tersebut, dalam perkembangannya bentuk partisipasi sudah bukan hanya sekedar pemberian kontribusi berupa uang atau sarana dari masyarakat untuk pemerintah, akan tetapi bentuk partisipasi berkembang kedalam bentuk partisipasi penyaluran pikiran, ide, gagasan bahkan pemberian inisiatif dari masyarakat yang meliputi seluruh tahap pembuatan, pelaksanaan, sampai ke tahap evaluasi suatu kegiatan yang hendak diselenggarakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk mendeskripsikan data dan informasi tentang topik atau isu-isu yang bertujuan untuk kepentingan pendalaman. Alasan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk mendeskripsikan dan menggali data mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Selain itu, penelitian kualitatif deskriptif dianggap mampu menjelaskan secara detail informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, atau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Sugiono, (2011:218) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu dan dapat memenuhi jawaban yang diharapkan sesuai dengan penelitian, atau mungkin dia dianggap penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Kriteria informan penelitian dengan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini ialah (1) Pegawai/staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang mengetahui berbagai tugas seluruh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dari berbagai bidang kerja masing-masing pegawai (2) Pegawai/staf yang menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis program (3) Pegawai/staf yang menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain. Berdasarkan hasil keputusan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, maka kriteria informan untuk pencarian data pada penelitian ini diarahkan pada Bidang Sub Umum dan Kepegawaian, termasuk kepala bidang dan para stafnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2011:130). Observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek *Good Governance* yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dengan masyarakat, mulai dari sistem kerja dinas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh dinas secara langsung. Selain itu observasi juga dilakukan dengan mengetahui cara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya.

Pada tahap awal pembuatan penelitian, observasi dilakukan secara tidak sengaja, yaitu ketika melakukan kunjungan ke berbagai tempat di Kota Surabaya, terdapat

kondisi dan keadaan lingkungan Kota Surabaya sangat bersih dan indah. Menurut beberapa info dari masyarakat, Kota Surabaya termasuk kota yang memperoleh penghargaan adipura kencana, yaitu penghargaan yang diperoleh kepada kota metropolitan yang memiliki kebersihan dan tata kelola lingkungan yang terjaga. Setelah ditelaah secara mendalam, kebersihan di Kota Surabaya tidak lepas dari peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan lingkungan lingkungan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, kemudian pendapat dan gagasan dari informan tersebut didengarkan secara teliti dan seksama sambil mencatat bagian-bagian yang penting.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, sehingga pada penelitian ini pihak-pihak yang diwawancarai adalah Bidang Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya karena di bidang tersebut mengetahui seluruh kegiatan dari berbagai bidang-bidang lain yang dilaksanakan oleh para pegawai/staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, maka wawancara terstruktur ini dilakukan kepada Kepala Sub Umum dan Kepegawaian, dan untuk melengkapi data maka wawancara juga dilakukan kepada staf/pegawai Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah beralu (Sugiyono, 2011:240). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Dibutuhkan teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi yang akan bermanfaat dalam memahami dan mengumpulkan data objek penelitian yang sedang diteliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen-dokumen catatan profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan foto-foto yang berupa data tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan teknik-teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data. Kredibilitas data diambil dengan teknik pengumpulan data dari berbagai

sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya (Moleong, 2011:330).

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara dan observasi yang diperoleh dari informan yang sama. Triangulasi sumber dilakukan dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, sebagai contoh informan satu sampai seterusnya tapi menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini juga dilakukan *check* dan *recheck*.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Kedua teknik triangulasi ini untuk mendapatkan data yang kredibel. Jadi penelitian ini tidak hanya mewawancarai Kepala Sub Umum dan Kepegawaian, tetapi juga mewawancarai para staf di bidang tersebut. Begitupun teknik yang digunakan tidak hanya wawancara mendalam tetapi juga observasi atau *check* dan *recheck*. Jadi ketika wawancara telah selesai, peneliti melakukan *check* dan *recheck* untuk mengetahui ketercapaian penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang telah diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, yaitu dengan mewawancarai masyarakat yang sedang melakukan kegiatan di sekitar Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Jadi dengan demikian data yang ditulis sesuai dengan kenyataan dilapangan.

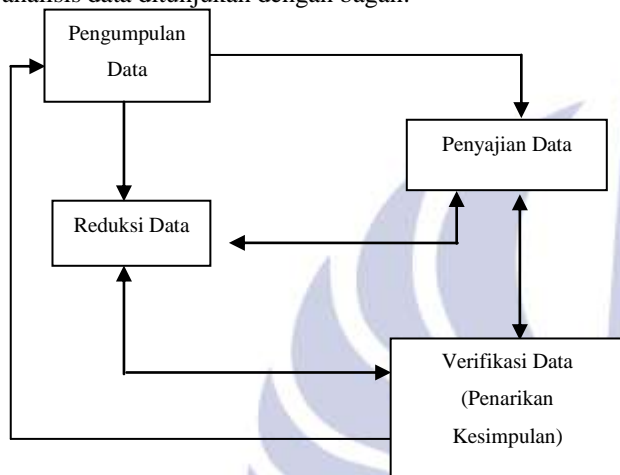
Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif tidak hanya berperan dalam pengumpulan data tetapi juga berperan sebagai sumber data dan pengelola hasil penelitian kualitatif. Peneliti terjun sendiri untuk melakukan penelitian dengan mendatangi subyek dan meluangkan waktu untuk mengamati aktifitas yang dilakukan subjek penelitian, oleh sebab itu kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam penelitian kualitatif, agar informasi yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan data yang absah.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan (Sugiono, 2013:307).

Dalam penelitian ini peneliti hanya bersifat pasif, artinya peneliti hanya ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan dan persoalan mengenai praktek penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga informasi yang digali pada fokus penelitian ini ialah penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan ketercapaian dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi fokus penelitian ialah prinsip strategi visi,

prinsip efektivitas, prinsip partisipatif, dan prinsip penerapan hukum.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Pada kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiono, 2013:336). Miles and Huberman (dalam Sugiono 1984) mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas (Sugiono, 2013:337). Langkah-langkah analisis data ditunjukkan dengan bagan:



Komponen Analisis Data Miles & Huberman (dalam Sugiono, 2013:338)

Proses pengumpulan dalam penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan pada teknik pengumpulan data. Yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya banyak dan tidak mungkin semua data ditulis dalam penelitian ini, untuk itu perlu dilakukan proses reduksi data. Reduksi data yang dimaksud ialah merangkum hasil pengumpulan data yang diperoleh di lapangan. Mereduksi data dengan cara diambil data yang menjadi fokus dalam penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. (Sugiono, 2013:338).

Langkah selanjutnya setelah data direduksi ialah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah dengan didukung oleh data. Miles and Huberman (2007:17) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Penarikan kesimpulan dengan dilakukan dengan meninjau kembali data yang telah disajikan. Tinjauan tersebut bertujuan untuk mencocokkan hasil kesimpulan

yang telah didapat dalam penelitian dengan rumusan masalah. Dalam membuat kesimpulan harus disertai dengan data yang valid. Kesimpulan merupakan suatu tujuan ulang pada catatan di lapangan. Kesimpulan dapat ditinjau dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya (Miles 2007:19)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan.

Upaya mewujudkan *good governance* atau tata kelola yang baik dalam urusan kebijakan publik bukan hanya tugas yang wajib diperankan oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk berperan dalam urusan kebijakan publik. Salah satu urusan kebijakan publik ialah tentang pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya pengelolaan kebersihan dan taman di Kota Surabaya menjadi tugas dan fungsi pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, sebagai mitra pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya berhak mengikutsertakan masyarakat Kota Surabaya dalam kegiatan pengelolaan lingkungan guna untuk mewujudkan *good governance* dalam tata kelola lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan terealisasi dengan baik ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam kinerjanya membangun Kota Surabaya telah melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut tertuang dalam tujuan visi dinas yaitu “meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan taman”. Oleh karena itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, karena dari masing-masing prinsip-prinsip *good governance* mempunyai makna bahwa dalam suatu lembaga pemerintahan tertentu memiliki tujuan utama kinerjanya ialah mementingkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi. Berdasarkan data lapangan penelitian ini, penerapan prinsip-prinsip *good governance* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

Prinsip Strategi Visi

Visi suatu lembaga tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan strategi-strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Strategi pencapaian visi yang terimplementasikan dengan baik, akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya mempunyai visi yakni meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan taman, oleh karena itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya membuat beberapa strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Kepala

Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yaitu Bapak Wishnu Wibowo, ST. M.Ikom mengungkapkan bahwa terdapat strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu:

“Secara singkat gambaran kerja kita ialah membuat beberapa program kegiatan pengelolaan lingkungan untuk menjaga lingkungan Kota Surabaya ini, dan memang disini kita mencoba untuk melibatkan masyarakat kemudian juga melibatkan pihak lain. Pertama, kita membuat program yang memang dilakukan oleh dinas ini sendiri, dan yang kedua dilakukan oleh masyarakat, kemudian yang ketiga dilakukan oleh pihak lain. Kita buat kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Kalau kegiatan yang dilakukan DKP contohnya *mbangun* taman, memelihara taman, kemudian ada komposing, penerangan jalan umum, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung kebersihan kota ini yang tentunya dengan merawat lingkungan, seperti contoh lain misalnya membersihkan jalan, menyapu jalan, nyiram tanaman, dan lain-lain, kemudian yang dilakukan masyarakat misalnya mereka kerja bakti bersihkan kampung mereka atau membuat pengelolaan lingkungan dengan bank sampah. Jadi nanti masyarakat membantu mengumpulkan sampahnya, nanti setelah sampah terkumpul maka petugas DKP Surabaya yang akan mengangkutnya.”

(Wawancara: Kamis, 24 Maret 2016)

Berdasarkan penuturan Bapak Wishnu Wibowo, ST. M.Ikom diatas menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya membuat program pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk pihak masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat ialah kegiatan kerja bakti atau bisa dengan membuat kegiatan bank sampah. Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memberikan dukungan atau bantuan, yakni dengan memberikan bantuan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat.

Pada dasarnya pembuatan kegiatan pengelolaan lingkungan hanya dijadikan sebagai alat atau sarana untuk memancing masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, Jadi adanya program kegiatan pengelolaan lingkungan yang dibentuk belum dapat dijadikan sebagai patokan apakah masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik dan benar ataukah belum. Jadi untuk menggerakkan masyarakat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dibantu oleh beberapa Kader Lingkungan. Berikut adalah pemaparan dari Ibu Vieka Ariestyani Antari, ST sebagai staf Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya mengenai keberadaan kader lingkungan :

“...Ada beberapa kegiatan DKP yang memang memerlukan partisipasi masyarakat. Untuk strategi menggerakkan partisipasi masyarakat,

kita disini punya kader lingkungan *Mbak*. Kader lingkungan yang nantinya akan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Kota Surabaya ini kan wilayahnya banyak, jadi otomatis kita disini *gak* bisa *mantau* satu per satu wilayah Surabaya mana saja yang memang masyarakatnya kurang partisipatif. Maka dari itu di setiap wilayah Kota Surabaya ada yang namanya kader lingkungan. Kader lingkungan itu sifatnya menggerakkan masyarakat. Seperti itu *Mbak*.”

(Wawancara : Selasa, 22 Maret 2016)

Dari pemaparan Ibu Vieka Ariestyani Antari, ST (staf sub Umum dan Kepegawaian) tersebut menjelaskan bahwa di setiap wilayah kota Surabaya terdapat Kader Lingkungan. Kader Lingkungan ini bersifat sebagai “pengomprom” atau yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini untuk mengatasi masalah perbedaan karakteristik sifat individu dari masing-masing masyarakat, karena tidak semua masyarakat bersedia untuk menyalurkan partisipasinya. Oleh karena itu, Kader Lingkungan perlu memiliki ketrampilan khusus dalam mengajak masyarakat, supaya masyarakat tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Kader Lingkungan yang bertujuan untuk memberikan bekal ketrampilan dalam mengajak masyarakat. Setelah Kader Lingkungan dibina dan dilatih, kemudian mereka yang akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola lingkungan Kota Surabaya. Berikut adalah pemaparan dari Bapak Wishnu Wibowo, ST. M.Ikom sebagai Kepala Sub Umum dan Kepegawaian mengenai pemberian pelatihan dan pembinaan kepada Kader Lingkungan :

“...Supaya masyarakat mau bergerak dan supaya masyarakat mau berpartisipasi, itu harus ada yang menggerakkan, istilahnya harus ada yang mau ngompori dan mau mengajak. Mereka itu Kader Lingkungan. Peran mereka sangat penting, DKP juga sangat terbantu dengan adanya Kader Lingkungan. Mereka itu kita ambil dari tokoh masyarakat misalnya dari ketua RT, PKK, karang taruna. Sebelumnya mereka kita latih, misalkan kita latih cara memilah sampah seperti ini dan seperti itu nanti kalau sampahnya udah terkumpul akan diapakan dan dikemanakan sampahnya. *Nah* setelah mereka dapat pengetahuan seperti itu mereka yang akan mengajak masyarakat sekitarnya dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai manfaat-manfaatnya. Itulah yang dimaksud kader lingkungan...”

(Wawancara : Kamis, 24 Maret 2016)

Dari petikan wawancara yang di utarakan oleh Bapak Wishnu Wibowo, ST. M.Ikom menunjukan bahwa untuk membentuk Kader Lingkungan yang berkualitas, maka pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan melatih dan membina Kader Lingkungan. Kader Lingkungan di latih dan di bina sebelum mereka terjun ke masyarakat untuk

menggerakkan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesiapan Kader Lingkungan dalam mentransfer pengetahuan dan menggerakkan masyarakat mengenai setiap kegiatan program-program pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan oleh Dinas.

Kader Lingkungan ialah relawan atau voluntir yang rela membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Vieka Ariestyani Antari, ST sebagai berikut:

“Kader lingkungan itu dari pihak masyarakat selaku *voluntir* atau relawan dan bisa dibilang sukarela membantu pelaksanaan program-program dinas. Tidak ada honor dan tidak digaji. Tapi perannya mereka sangat membantu kita, Jadi secara otomatis kita pasti ada *feedback*, salah satunya memberikan mereka apresiasi dalam bentuk materi maupun non materi. Kalo dibilang sudah maksimal dalam menggerakkan masyarakat, menurut saya pribadi sudah maksimal. Kader lingkungan sangat membantu pemerintah Kota Surabaya, dari 160 kelurahan yang ada di Kota Surabaya kurang lebih sekitar 90% lebih kadernya itu aktif untuk menggerakkan masyarakat, minimal menggerakkan masyarakat dalam memilah sampah.”

(Wawancara : Selasa, 22 Maret 2016)

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Vieka diatas, menjelaskan bahwa Kader Lingkungan merupakan wakil dari masyarakat yang mempunyai jiwa besar untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam menciptakan Kota Surabaya yang bersih, sebab Kader Lingkungan merupakan pihak dari masyarakat yang sukarela dan tanpa pamrih menggerakkan partisipasi masyarakat. Kader Lingkungan tidak menerima upah atau gaji secara nyata dari pihak siapapun, akan tetapi hanya menerima apresiasi dari masyarakat dan pihak Dinas. Jadi dengan demikian pada prinsip strategi visi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ialah dengan membuat beberapa program kegiatan pengelolaan lingkungan dan dengan menggandeng beberapa Kader Lingkungan yakni wakil dari masyarakat yang membantu tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Prinsip Efektifitas

Prinsip efektifitas diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk mengetahui seberapa besar pencapaian yang diraih pada saat melakukan strategi-strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wishnu Wibowo, ST. M.Ikom agar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan lebih efektif, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melibatkan pihak lain seperti berikut:

“Jadi kita melibatkan pihak lain itu untuk menginformasikan ke masyarakat mengenai program-program kegiatan pengelolaan

lingkungan yang akan kita adakan, istilahnya mereka membantu mempromosikan. Pihak lainnya itu bisa dari komunitas, media massa, lembaga pendidikan, kemudian LSM, dan lain-lain. Jadi ada pihak lain yang terlibat. Misalkan keterlibatan LSM untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat dan memberikan kampanye. Kemudian media memberi info ke masyarakat, contohnya ada info kegiatan lomba Surabaya *Green and Clean* atau lomba Merdeka dari Sampah, info itu akan kami *share* melalui media. Tujuannya itu apa si, ya tujuannya supaya masyarakat tau dan akhirnya ikut kegiatan yang sudah di *share*. Jadi dalam program-program kita ada yang namanya keterlibatan pihak-pihak tersebut, termasuk masyarakat dan pihak lain.”

(Wawancara : Kamis, 24 Maret 2016)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Satriyo selaku staf Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai berikut:

“Salah satunya kita melibatkan jawapos Mbak. Misalkan kita membuat kegiatan lomba. Lomba SGC dan MDS, infonya kita sebar lewat jawapos, atau bisa juga lewat internet atau media center. Nanti kalau masyarakat udah tau, biasanya setiap masyarakat saling ngasih info, istilahnya tukar info kalo ada kegiatan ini dan kegiatan itu. Itu salah satu kita ngajak masyarakat, walau ngajaknya gag secara langsung.

(Wawancara : 15 Maret 2016)

Dari pemaparan tersebut, maka prinsip efektifitas dalam penelitian ini diketahui bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memilih untuk melibatkan beberapa pihak lain seperti keterlibatan media, LSM, dan pelaku kepentingan lain untuk mengefektifkan kinerja mereka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Prinsip Partisipasi

Kondisi masyarakat yang majemuk di Kota Surabaya, menuntut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk dapat bersikap adil dan kolektif dalam menampung setiap partisipasi dan inovasi dari masyarakat. Hal ini karena masyarakat di Kota Surabaya merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik sifat beraneka ragam, itu semua karena mereka datang dari berbagai daerah. Oleh karena itu, adanya prinsip partisipasi ini sangat penting untuk di implementasikan dengan baik, karena prinsip partisipasi diterapkan bertujuan agar lebih kolektif dalam menampung segala bentuk partisipasi masyarakat.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya telah menerapkan prinsip partisipatisi karena telah membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat yang ikut dalam pengelolaan lingkungan, ditandai dengan keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan proses pembangunan. Beberapa tahapan pembangunan termasuk dalam tahapan proses pengelolaan lingkungan secara umum terdapat tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan

tahap evaluasi. Hal ini sesuai penuturan Bapak Satriyo selaku Staf Sub Umum dan Kepegawaian :

“...Jadi mengenai partisipasi masyarakat yang kita butuhkan, bisa dikatakan dibutuhkan dalam hal apapun termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan...”

(Wawancara : Selasa, 15 Maret 2016)

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat. Pada tahap perencanaan masyarakat diikutkan dalam kegiatan musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) seperti yang dituturkan oleh Ibu Vieka Ariestyani Antari, ST (Staf Sub Umum dan Kepegawaian) :

“...Dalam hal penyampaian rencana yang dilakukan para kader-kader masyarakat dapat secara langsung ada yang namanya Musrenbang yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan. Disinilah forum dua arah antara masyarakat dengan berbagai dinas. Jadi nanti masing-masing SKPD (Satuan Kepala Pemerintah Daerah) akan hadir. Melalui musrenbang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini bisa menyampaikan program-program apa saja yang akan diselenggarakan, dan melalui musrenbang ini juga baik rencana maupun saran-saran dari masyarakat akan kita saring dan akan kita pertimbangkan. Tujuannya untuk mewujudkan komunikasi dua arah dengan masyarakat...”

(Wawancara : Selasa, 22 Maret 2016)

Partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan ini secara garis besar dirangkum dalam kegiatan Musrenbang, berikut adalah contoh kegiatan Musrenbang :



Kegiatan Musrenbang Satuan Kepala Pemerintah Daerah (SKPD) bersama Masyarakat

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang dibentuk oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Berikut adalah penuturan Bapak Satriyo (Staf Sub Umum dan Kepegawaian) mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan :

“...Ada beberapa program kegiatan yang melibatkan masyarakat. Contohnya masyarakat dilibatkan pada kegiatan rumah kompos. Dengan adanya rumah kompos, masyarakat bisa mengumpulkan sampah dan menyetorkan

sampah ke rumah kompos terdekat yang ada di sekitar kampung mereka. Lalu kita juga mengadakan lomba SGC dan MDS. SGC itu Surabaya *Green and Clean*, MDS itu Merdeka Dari Sampah. Lomba ini diadakan sengaja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan. Pada kegiatan lomba ini, masyarakat juga dikoordinir oleh Kader Lingkungan. Jadi memang banyak beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam kegiatan peduli lingkungan...”

(Wawancara : Selasa, 15 Maret 2016)

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Satriyo (Sub Umum dan Kepegawaian) memberikan penjelasan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan antara lain dengan melibatkan diri pada kegiatan rumah kompos. Pada kegiatan rumah kompos, masyarakat dapat mengumpulkan sampah dan kemudian disetorkan ke rumah kompos terdekat yang ada disekitar kampung mereka. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya juga mengadakan perlombaan kebersihan, yaitu lomba Surabaya *Green and Clean* dan lomba Merdeka dari Sampah. Kedua contoh kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat terlibat dalam kegiatan tata kelola lingkungan.

Pada tahapan pelaksanaan ini, masyarakat dapat melakukan segala inovasi mereka untuk membuat kampung lingkungan mereka menjadi bersih. Jadi pada tahapan pelaksanaan ini masyarakat dapat melakukan segala aktifitas pengelolaan lingkungan yang berdampak baik untuk lingkungan, contohnya masyarakat dapat mengadakan kegiatan “Jumat bersih” atau “kampungku sehat” dan lain sebagainya yang merupakan segala bentuk aktifitas mereka dalam pengelolaan lingkungan. Setelah masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan tersebut, nanti Kader Lingkungan akan melakukan evaluasi apakah kegiatan tersebut telah mberdampak baik dalam mengajak masyarakat untuk mengelola lingkungan ataukah masih perlu mengadakan kegiatan pengelolaan lingkungan lain agar masyarakat tertarik untuk ikut dalam pengelolaan lingkungan.

Kemudian pada tahap evaluasi, masyarakat juga bisa berpartisipasi yakni dengan melaporkan segala bentuk evaluasi kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melalui web surabaya.go.id seperti yang diutarakan oleh Bapak Wishnu Wibowo, ST.M.Ikom sebagai berikut:

“...Bentuk evaluasi masyarakat misalnya ada masyarakat yang melaporkan kejadian banjir yang selalu terjadi setiap tahun di RTnya. Setelah diselidiki ternyata penyebab banjirnya berasal dari RT lain, nah kemudian tindakan selanjutnya bagaimana supaya banjir tersebut gag terulang lagi. Seperti itu termasuk bentuk evaluasi mereka jadi mereka bisa melaporkan yaitu lewat media center yang dibuat Pemkot. Alamat webnya nanti bisa sampeyan buka di media center surabaya.go.id lalu klik sapa warga. Disitu semua laporan bisa di keluhkan apa saja. Bisa jalan, sampah, kemiskinan, PKL, dan lain-lain. Nanti dari media center tersebut akan di pilah.

untuk urusan PKL disampaikan ke satpol PP, kemudian urusan sampah disampaikan ke DKP. Jadi seperti itu Mbak salah satu cara kita membuat masyarakat supaya mereka melakukan evaluasi”

(Wawancara : Kamis, 24 Maret 2016)



Situs Surabaya.go.id

Gambar diatas adalah contoh gambar web media center Kota Surabaya yakni Surabaya.go.id yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan evaluasi dalam bentuk pengaduan setiap kegiatan pembangunan, termasuk dalam hal penanganan tata kelola lingkungan di Kota Surabaya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Satriyo (Staf Sub Umum dan Kepegawaian) mengenai pemberian kesempatan masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya dalam bentuk evaluasi, yakni sebagai berikut :

“Setiap kali masyarakat sudah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan tertentu. Entah itu yang dibentuk Dinas atau dibentuk masyarakat sendiri, nanti biasanya masyarakat akan lapor ke DKP. Yang lapor biasanya wakil dari masyarakat, misalnya Kader Lingkungan. Kader Lingkungan itu nanti bisa langsung datang ke DKP melaporkan hasilnya, misalnya ada kekurangan-kekurangan tertentu yang memerlukan bantuan dari DKP atau memerlukan solusi dari DKP”



Laporan evaluasi Kader Lingkungan ke pihak DKP Surabaya

Berdasarkan penuturan dari Bapak Satriyo dan berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa

masyarakat dapat melakukan tahap evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan masyarakat. Laporan bentuk evaluasi yang dilakukan Kader Lingkungan sebagai wakil masyarakat dengan cara melaporkan secara langsung ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya diatas merupakan bentuk evaluasi informal.

Prinsip Penerapan Hukum

Prinsip penerapan hukum diterapkan karena karena salah satu karakteristik masyarakat akan patuh dan tertib ketika terdapat hukum yang mengatur setiap tindakan dan tingkah laku mereka. Dalam proses pengelolaan lingkungan terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Setiap aturan-aturan tersebut harus ditaati dan ditegakkan. Jadi apabila terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan, maka perlu adanya penegakkan hukum. Masyarakat dapat dijadikan sebagai pihak yang menegakkan hukum, yaitu masyarakat dapat berperan dalam penegakkan hukum tentang pengelolaan lingkungan. Jadi masyarakat dapat berperan dalam menegur masyarakat lainnya ketika terdapat masyarakat yang lalai atau melanggar ketentuan dalam pemeliharaan lingkungan. Dengan demikian maka masyarakat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk menegakkan hukum tentang tata kelola lingkungan. Hal ini karena hukum tata kelola lingkungan tidak memandang status, derajat, ataupun kedudukan yang ada di dalam masyarakat.

Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memberikan teguran ke masyarakat sekaligus untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perlindungan lingkungan. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Satriyo (Staf Sub Umum dan Kepegawaian) mengenai pemberian sanksi untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan :

“Kalo masalah sanksi, iya ada. ada larangan-larangan, ada sanksi-sanksi. di aturan Perda itu juga di atur. Untuk pemberian sanksi, yang pertama kita tidak langsung kasih sanksi yang berat, tapi kita kasih teguran dulu. Teguran itu kita kasih dalam bentuk pemberian sanksi sosial, kalo masyarakat yang sadar gag akan mungkin melakukan pelanggaran lagi. Tapi kalo memang sanksi teguran itu gag mempan akan kita kasih sanksi administrative, bahkan dengan sanksi uang paksa, maksudnya dimintai uang untuk ganti rugi”

(Wawancara : Selasa, 15 Maret 2016)

Dari penuturan Bapak Satriyo selaku staf Sub Umum dan Kepegawaian tersebut menjelaskan bahwa penegakkan hukum lingkungan kepada para pelaku pelanggaran lingkungan dapat dilakukan dengan cara memberikan teguran terlebih dahulu kepada masyarakat, ketika teguran yang diberikan tidak mampu membuat jera masyarakat, maka masyarakat akan dikenai sanksi, yakni sanksi administratif yang telah disesuaikan dengan seberapa besar bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemberian teguran terhadap para pelaku pelanggaran terhadap lingkungan yang dilakukan masyarakat dapat juga dibantu oleh Kader Lingkungan. Jadi ketika masyarakat melakukan pelanggaran dengan merusak lingkungan mereka sendiri, maka secara langsung Kader Lingkungan yang akan memberikan peringatan. Jika masih tetap mengulangi perbuatan yang dapat merugikan lingkungan tersebut, maka Kader Lingkungan akan mengadukannya kepada pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Ibu Vieka Ariestyani Antari, ST:

“Kader Lingkungan selain membantu kita dalam menggerakkan masyarakat, mereka juga membantu kita dalam memantau masyarakat. Memantaunya itu misalnya bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungan mereka sendiri, dipelihara atau malah dirusak itu semua nanti Kader Lingkungan bisa lapor ke kita, Soalnya kita pihak DKP tidak bisa mantau secara langsung tiap-tiap masyarakat di Kota Surabaya, sedangkan kita tahu kota ini bukan kota yang sempit tapi luas. Jadi kehadiran Kader Lingkungan sangat membantu kita”
(Wawancara: Selasa, 22 Maret 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut, masyarakat sudah dilibatkan dalam penegakkan hukum tentang pengelolaan lingkungan, yakni masyarakat dilibatkan untuk saling memantau tiap-tiap perbuatan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat lain. Masyarakat juga dapat menegur dan dapat pula mengadukan ke pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya jika pelanggaran yang dilakukan memberikan dampak yang negatif bagi kelangsungan lingkungan.

PEMBAHASAN

Lingkungan Kota Surabaya memiliki tata kelola yang baik semua itu tidak lepas dari peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat dilibatkan dan didorong partisipasinya untuk bersama-sama mengelola lingkungan Kota Surabaya. Hal ini karena masyarakat merupakan sekumpulan individu yang tidak bisa lepas dari lingkungan. Jadi untuk menangani tata kelola lingkungan di Kota Surabaya, apabila hanya peran dari pemerintah saja dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka akan kesulitan dalam mencapai tujuan, yakni tujuan untuk menciptakan kebersihan secara merata di lingkungan Kota Surabaya.

Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, karena dalam prinsip-prinsip *good governance* tertuang adanya makna upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada masyarakat sebagai organisasi yang memiliki tanggungjawab yang baik dan dapat dipercaya mampu mengayomi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan

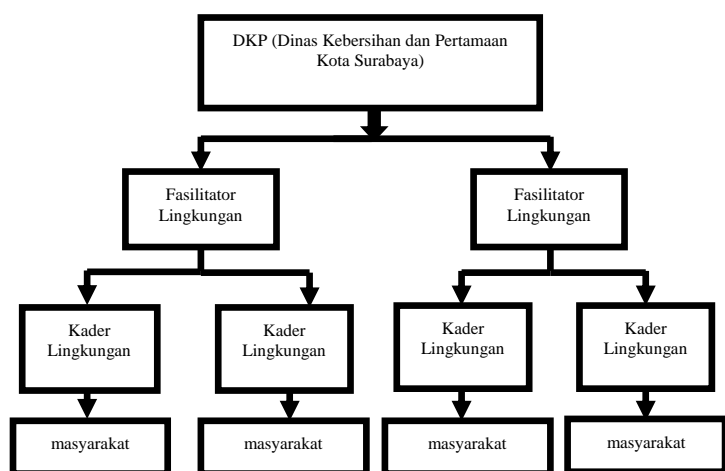
lingkungan. Dalam pengertian prinsip-prinsip *good governance* pula terdapat pengertian suatu mekanisme, praktek, maupun tata cara yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya bersama masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan publik, dalam hal ini masalah yang diteliti ialah tata kelola lingkungan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut adalah penerapan prinsip-prinsip Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya :

Prinsip Strategi Visi

Pada penerapan prinsip strategi visi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya mempunyai beberapa strategi yakni, membuat beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan hal yang penting, oleh karena itu upaya meningkatkan peran serta masyarakat telah disebutkan dalam penjelasan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan taman. Guna mencapai visi tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya membuat beberapa strategi, antara lain ialah membuat program kegiatan pengelolaan lingkungan yang didalamnya terdapat keterlibatan masyarakat. Pembentukan strategi-strategi ini merupakan salah satu penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yakni prinsip strategi visi.

Beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ialah dengan menggandeng beberapa Kader Lingkungan (wakil masyarakat) untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan Kader Lingkungan dalam hal ini juga bukan hanya sekedar menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, akan tetapi juga terlibat dalam mengevaluasi setiap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi keterlibatan Kader Lingkungan ini sangat memberikan pengaruh yang besar bagi keberlangsungan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melatih dan membina para Kader Lingkungan salah satu tujuannya untuk membentuk mental jiwa kepemimpinan yang baik dan siap untuk menggerakkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Jadi pada prinsip strategi visi, jika dianalogikan strategi visi ini membentuk layaknya bisnis MLM (*Multi Level Marketing*), yaitu terjadi beberapa tahap dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai berikut :



Bagan Alur Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dari bagan tersebut diketahui bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan terjadi beberapa pihak yang terlibat, yakni keterlibatan Kader Lingkungan dan Fasilitator Lingkungan. Kader Lingkungan dan Fasilitator Lingkungan keduanya mempunyai tugas yang sama, yaitu bersama-sama menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi untuk fasilitator lingkungan, jumlah masyarakat yang digerakkan atau masyarakat yang dibina lebih banyak daripada jumlah masyarakat yang dibina dan digerakkan oleh Kader Lingkungan. Jadi keberadaan fasilitator lingkungan ini sebenarnya sama dengan Kader Lingkungan.

Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, menyatakan bahwa Kader Lingkungan dapat naik jabatan atau naik kedudukan menjadi fasilitator lingkungan apabila Kader Lingkungan telah dapat menggerakkan masyarakat tidak hanya didesa/kampungnya saja, tapi sudah dapat menggerakkan masyarakat di desakampung lainnya. Pemberian posisi Kader Lingkungan menjadi Fasilitator Lingkungan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada Kader Lingkungan karena telah membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengkonsistensikan antara tujuan yang akan dicapai dengan hasil yang diharapkan. Pada setiap program pengelolaan lingkungan yang dibentuk oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya telah menghasilkan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya selalu melibatkan para pihak lain (*stakeholder*) yang mempunyai kepentingan. Pihak-pihak tersebut sebagai contoh antara lain media massa seperti jawapos dan keterlibatan LSM.

Keterlibatan pihak lain tersebut memberikan keefektifan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena para pihak tersebut sebagai

perantara yang dipilih Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang dapat masyarakat lakukan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

Media massa seperti jawapos membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam memberikan sumbangsih berupa upaya untuk mempromosikan kepada masyarakat tentang program-program kegiatan pengelolaan lingkungan yang dapat diikuti oleh masyarakat, seperti adanya kegiatan bank sampah, rumah kompos, hingga lomba kebersihan seperti lomba Surabaya *Green and Clean* (SGC) dan lomba Merdeka Dari Sampah (MDS). Kemudian keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membantu dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi hal-hal yang berdampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan masyarakat.

Prinsip Partisipasi

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penerapan prinsip partisipatif ini sangat diperlukan. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai proses pengelolaan lingkungan baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan pada kegiatan Musrenbang yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan. Dari kegiatan tersebut masyarakat dapat mengemukakan ide, gagasan, inovasi, dan masukan-masukan yang bersifat membangun dan mengkritikisi hasil pembangunan. Berbagai masukan dari masyarakat akan ditampung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai upaya untuk mengevaluasi segala program kerja yang telah dilaksanakan.

Kemudian pada tahap pelaksanaan, salah satu upaya melibatkan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat ialah salah satu contoh dengan mendirikan rumah kompos. Melalui rumah kompos, masyarakat dapat mengumpulkan sampah, memilah sampah, dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna. Yang kedua ialah, mengadakan perlombaan kebersihan seperti Surabaya *Green and Clean* dan Merdeka dari Sampah, dll, dengan adanya perlombaan kebersihan tersebut masyarakat semakin antusias dalam mengelola lingkungan mereka masing-masing dengan berbagai tawaran penghargaan dan hadiah yang menarik. Dan yang Ketiga ialah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan bank sampah dikampung mereka masing-masing, tentunya juga didukung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Pada tahap pengawasan, masyarakat dapat mengevaluasi sejauh mana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya berhasil menjalankan kinerjanya dan sejauh mana masyarakat itu sendiri ikut serta dalam program/kegiatan pengelolaan lingkungan. Bentuk evaluasi atau pengawasan dari masyarakat dapat disalurkan melalui formal dan informal. Dalam bentuk informal, masyarakat dapat secara langsung melaporkan beberapa laporan pengelolaan lingkungan yang mereka

lakukan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yaitu dengan secara langsung datang langsung ke kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Sedangkan dalam bentuk formal, masyarakat dapat melaporkan melalui media center. Melalui media center tersebut, masyarakat dapat menyalurkan evaluasi dalam bentuk kritikan, masukan, dan saran mereka terhadap pengelolaan lingkungan yang telah berlangsung

Dilibatkannya masyarakat dalam setiap bentuk partisipasi tersebut yakni pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi merupakan upaya untuk mewujudkan adanya *good governance*. Jadi dalam hal tata kelola lingkungan yang ada di Kota Surabaya sudah terjalin kerjasama yang baik antara pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya bersama masyarakat Kota Surabaya.

Masyarakat Kota Surabaya sudah dapat menyalurkan segala bentuk partisipasi mereka terhadap pengelolaan lingkungan dengan baik. hal ini juga membuktikan adanya kepemimpinan yang baik sudah diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sudah menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat Kota Surabaya. Kepemimpinan yang baik tersebut ditandai oleh beberapa hal antara lain, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya telah memberikan arahan-arahan yang baik, yakni mengarahkan masyarakat kepada program-program kegiatan pengelolaan lingkungan. Kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya telah memberikan dukungan kepada masyarakat atas segala kegiatan tata kelola lingkungan yang dilakukan masyarakat, sebagai contoh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya membantu masyarakat untuk mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat seperti pada kegiatan kerjabakti atau kegiatan bank sampah yang diadakan oleh masyarakat.

Lalu yang terpenting ialah, peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan telah dibuka selebar mungkin. Sehingga masyarakat dengan leluasa menyalurkan segala bentuk partisipasi mereka. Dari hal-hal tersebut membuktikan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya telah mampu menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat dan bagi kelangsungan perbaikan lingkungan di Kota Surabaya.

Prinsip Penerapan Hukum

Dalam hal apapun, hukum memang harus ditegakkan, termasuk hukum pelanggaran terhadap lingkungan. Mengenai peran serta masyarakat untuk menjaga dan mengelola lingkungan, telah diatur dalam Perda No.5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Apabila ada pihak baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah yang melanggar aturan tersebut maka hukum akan ditegakkan. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat jera, sehingga masyarakat akan sadar mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam mengelola lingkungan. Hukum juga tidak pandang bulu, jadi apapun bentuk pelanggaran

lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat maupun dilakukan oleh pemerintah tetap harus ditegakkan.

Jadi dalam hal ini masyarakat dapat memantau lingkungan dari segala bentuk pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak siapapun. Sebagai Kader Lingkungan, maka mereka berhak untuk menegur warga masyarakat yang mereka bina dalam pengelolaan lingkungan agar tidak melakukan perbuatan yang dapat berpengaruh negatif untuk lingkungan. Oleh karena itu Kader Lingkungan memiliki peran yang signifikan untuk membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

Beberapa sanksi hukum yang diberikan kepada setiap pelanggaran lingkungan juga ditegakkan. Sanksi hukum yang ditegakkan berupa sanksi administrative dan sanksi pidana. Dalam hal penjatuhan sanksi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya tidak memutuskan secara langsung, akan tetapi penetapan sanksi ditetapkan oleh pihak pengadilan. Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya hanya menangkap para pelaku pelanggaran lingkungan tersebut. Kecuali pelanggaran yang bersifat ringan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan memberikan teguran, baik teguran lisan maupun tertulis.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan terdapat prinsip yang mendominasi prinsip lainnya, yakni prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi lebih mendominasi karena pada prinsip tersebut, masyarakat telah menyalurkan segala bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan mereka dalam mengelola lingkungan kota Surabaya. Akan tetapi penerapan prinsip-prinsip lain seperti prinsip strategi visi, prinsip efektifitas, dan prinsip penerapan hukum juga sangat mempengaruhi keberlangsungan dalam mewujudkan *good governance*. Sebagaimana dijelaskan dalam prinsip strategi visi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya membuat berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat contohnya dengan membuat berbagai program kegiatan pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk masyarakat dan menggandeng beberapa Kader Lingkungan yaitu wakil dari masyarakat yang akan menggerakkan partisipasi masyarakat secara langsung setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Jadi dengan demikian, keseluruhan dari prinsip-prinsip *good governance* akan lebih baik jika diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya guna untuk membuat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, maka dalam penelitian ini terdapat saran sebagai masukan antara lain untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yakni sebagai berikut: (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam membangun tata kelola lingkungan Kota Surabaya sebaiknya mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat karena masyarakat merupakan bagian dari tata kelola lingkungan Kota Surabaya. (2) Pemberian pelatihan dan pembinaan yang di berikan kepada Kader Lingkungan dan Fasilitator Lingkungan perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan sesering mungkin agar Kader Lingkungan dan Fasilitator mempunyai kesiapan dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. (3) Strategi pembangunan Kota Surabaya berupa gagasan-gagasan dan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan lingkungan yang lebih inovatif perlu diciptakan dan diwujudkan sebaik mungkin, karena hal itu dapat menyadarkan masyarakat dan mendorong semangat masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan. (4) Masyarakat perlu dijadikan sebagai rekan kerja yang baik dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya, karena permasalahan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Girsang, Juwita Libset. 2011. *Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan (Kasus : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Megamendung, Bogor)*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2007. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta: Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Press.
- Purnamasari, Dewi. 2006. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.